



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO



## EDISI RABU, 14 DESEMBER 2022

### RINGKASAN BERTA HARI INI



#### Dinkes: Banyak Warga Masih Melakukan BABS

SIDOARJO - Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mengungkapkan masih banyak warga yang melakukan BABS (Berkas Air Bersih) sebagai cara untuk mendapatkan air bersih. Padahal, pemerintah telah menyediakan layanan air minum yang layak.



#### Jadi Orang Pertama Bayar PBB, Gus Muludh Pertama Sepeda Gunung

SIDOARJO - Bupati Sidoarjo Gus Muludh menjadi orang pertama yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, ia juga menjadi orang pertama yang menggunakan sepeda gunung di Kabupaten Sidoarjo.



#### Awasi, Tilang Manual Bakal Diterapkan Lagi di Sidoarjo

SIDOARJO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sidoarjo mengawasi pelaksanaan tilang manual yang akan diterapkan kembali di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dilakukan untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam proses penindakan.

#### LINTAS PELAYANAN Banyak Masyarakat Ajukan Izin Rayakan Malam Tahun Baru 2023

SIDOARJO - Banyak masyarakat yang mengajukan izin untuk merayakan Malam Tahun Baru 2023 di Kabupaten Sidoarjo. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo telah menerima puluhan permohonan izin tersebut.

#### Targetkan PAD Tahun Depan Rp 1,935 Triliun

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun depan mencapai Rp 1,935 triliun. Hal ini merupakan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

#### Bupati Minta TNI, Polri dan ASN Jaga Netralitas di Pemilu 2024

SIDOARJO - Bupati Sidoarjo meminta TNI, Polri, dan ASN untuk menjaga netralitas di Pemilu 2024. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses pemilihan umum berjalan lancar dan adil.



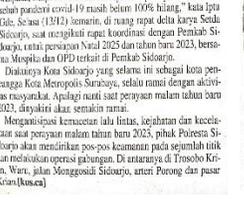
#### PJU (Padam Sejam) Berfungsi

SIDOARJO - Program Padam Sejam (PJU) di Kabupaten Sidoarjo telah berhasil dilaksanakan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional.



#### IGTKI-PGRI Gelar Festival Literasi Anak-anak PAUD

SIDOARJO - IGTKI-PGRI Kabupaten Sidoarjo menggelar Festival Literasi Anak-anak PAUD. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan literasi di kalangan anak-anak usia dini.



#### Targetkan 17 Jalan Dibeton, 14 Tuntas, 3 Masih Dikerjakan

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menargetkan 17 jalan untuk dibeton di tahun ini. Saat ini, 14 jalan telah tuntas, dan 3 jalan masih dalam proses pengerjaan.



#### PJU Desain Klasik Hiasi Frontage Road Segmen Satu

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah selesai mendesain Frontage Road Segmen Satu dengan desain klasik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan estetika dan kenyamanan pengguna jalan.



#### Anggaran Minim, Akhiri Kerja Sama JKMM dengan RS Swasta

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan RS Swasta karena anggaran yang minim. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan anggaran dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

#### Pasang 56 PJU Tematik di Jalur Frontage Road

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memasang 56 PJU Tematik di Jalur Frontage Road. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan estetika dan kenyamanan pengguna jalan.



#### Komis D Minta Tingkatkan Kualitas Pendidikan dengan Pendidikan

SIDOARJO - Komisi D DPRD Sidoarjo meminta pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.



#### Bawaslu Bentuk Gakkumdu, Tertibkan Pemilu

SIDOARJO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sidoarjo membentuk Gakkumdu untuk tertibkan pelaksanaan Pemilu. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses pemilihan umum berjalan lancar dan adil.



#### Ubah Skema Biaya Haji, Usulkan Penghapusan Subsidi

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan penghapusan subsidi biaya haji. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban anggaran pemerintah.



#### Akademisi: Fenomena Gangster di Sidoarjo adalah Perilaku Imitasi

SIDOARJO - Akademisi menilai fenomena gangster di Sidoarjo sebagai perilaku imitasi. Hal ini disebabkan oleh pengaruh budaya populer dan kurangnya pengawasan masyarakat.

#### Masih Polemik, Target Rekrutasi Parkir Telp

SIDOARJO - Masih ada polemik mengenai target rekrutasi parkir telpon. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pendapat mengenai jumlah dan lokasi parkir telpon yang diperlukan.

#### Ajak OKP dan Perguruan Silat Cegah Gangguan Keamanan

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengajak OKP dan Perguruan Silat untuk membantu mencegah gangguan keamanan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

#### Pengelola Parkir PTSS Gagal Target Rp 20,4 Miliar, Realisasi Rp 300 Juta

SIDOARJO - Pengelola Parkir PTSS gagal mencapai target pendapatan sebesar Rp 20,4 miliar. Realisasi yang tercapai hanya Rp 300 juta. Hal ini menunjukkan rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan parkir PTSS.



#### Diperbanyak oleh Subag Pesidangan, Humas dan Risalah Sekretariat DPRD Sidoarjo

SIDOARJO - Sekretariat DPRD Sidoarjo diperbanyak oleh Subag Pesidangan, Humas, dan Risalah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.

#### Targetkan 17 Jalan Dibeton, 14 Tuntas, 3 Masih Dikerjakan

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menargetkan 17 jalan untuk dibeton di tahun ini. Saat ini, 14 jalan telah tuntas, dan 3 jalan masih dalam proses pengerjaan.

#### PJU Desain Klasik Hiasi Frontage Road Segmen Satu

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah selesai mendesain Frontage Road Segmen Satu dengan desain klasik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan estetika dan kenyamanan pengguna jalan.

#### Anggaran Minim, Akhiri Kerja Sama JKMM dengan RS Swasta

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan RS Swasta karena anggaran yang minim. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan anggaran dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

## Pengelola Parkir PT ISS

# Gagal Target Rp 20,4 Miliar, Realisasi Rp 300 Juta

SIDOARJO - Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo Bambang Pujianto, mengatakan bahwa hingga saat ini anggaran yang masuk hanya Rp 300 juta dari target sebesar Rp 20,4 Miliar melalui sektor retribusi parkir.

"Itupun masih dikurangi honor pembayaran Jukir (Juru Parkir, red) sebesar Rp 1,5 Miliar dan biaya cetak karcis parkir, katanya Selasa 13/12

Dikatakan oleh politisi Partai Gerindra itu bahwa hingga saat ini pihaknya belum mengetahui nilai pendapatan dari hasil kerjasama pengelolaan parkir tepi jalan dan tempat khusus yang dikelola oleh PT Indonesia Sarana Service (ISS).

"Berdasarkan informasi yang kami terima, sama sekali belum ada pembayaran imbal jasa



PARKIR: Tempat khusus parkir yang dikelola oleh PT Indonesia Sarana Service (ISS) di Kabupaten Sidoarjo

kerjasama dari PT ISS sampai saat ini. Sepertinya polemiknya juga belum selesai, termasuk

rencana adendum PKS (Perjanjian Kerjasama, red)," ucapnya. Untuk itu, pihaknya akan

mempertanyakan kepada Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani masalah ini sehingga gagal memenuhi target pendapatan sebesar Rp 20,4 Miliar.

"Ya harus dipertanggungjawabkan, kenapa sampai gagal memenuhi target pendapatan sebesar Rp 20,4 Miliar itu," tandasnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bisa dipastikan gagal dalam memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir di tahun anggaran 2022 ini. Karena hingga pekan kedua di bulan Desember 2022 ini, belum diketahui dengan pasti jumlah rupiah yang terseteror ke Kas Daerah (Kasda) Kabupaten Sidoarjo.

Padahal di awal tahun 2022 lalu sempat berhembus angin surga dari hasil lelang kerjasama pengelolaan parkir tersebut yang menelurkan angka Rp 32,09 Miliar bersih tanpa potongan ke Kasda Kabupaten Sidoarjo.

Sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam lelang, uang itupun seharusnya dibayarkan di depan atau sebelum pihak rekanan Pemkab Sidoarjo beraksi di lapangan. Namun dalam PKS yang ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sidoarjo dan Direktur PT ISS, klausul tersebut diubah menjadi pembayaran secara bertahap setiap tanggal 18/bulannya.

"Tahun 2021 lalu juga gagal. Nanti akan kita panggil OPD terkait untuk menjelaskan masalah ini," tegasnya. • (yud)

## DAFTAR

# Masih Polemik, Target Retribusi Parkir Tetap

KOTA-Capaian retribusi daerah dari sektor parkir tahun ini dipastikan tidak bisa dipenuhi. Hal itu karena hingga saat ini setoran dari PT ISS yang menjadi rekanan dalam pengelolaan parkir belum sesuai target. Baru sekitar Rp 300 juta dari target Rp 20,4 miliar.

Melihat angka setoran tersebut, anggota Badan Anggaran (banggar) DPRD Sidoarjo Sudjalil mengatakan, tahun depan target retribusi dari sektor parkir tidak ditingkatkan. Tetap Rp 20,4 miliar. Padahal idealnya setiap tahun ada peningkatan target sebanyak 5 hingga 7 persen.

Menurut dia, polemik yang terjadi saat ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan, namun juga meningkatkan layanan kepada masyarakat. "Yang terpenting kan itu, pelayanan kepada masyarakat harus baik, karena mereka sudah bayar," ujarnya.

Politikus PDIP itu meminta Pemkab untuk melakukan evaluasi terhadap pelayanan parkir. Saat ini di beberapa titik memang sudah diterap-



OBJEK RETRIBUSI: Salah satu titik parkir yang dikelola oleh PT ISS sejak tahun ini.

kan pelayanan parkir yang dikelola PT ISS. Warga mendapatkan bukti pembayaran berupa karcis. Namun masih ada keluhan seperti tidak mendapatkan karcis. Sehingga bentuk pengawasan dari Pemkab harus diperketat lagi.

Dia berharap polemik parkir selesai tahun ini. Jika memang ada adendum, maka segera diselesaikan. Yang jelas, jangan sampai target pajak dan retribusi dari sektor parkir kosong. Sebab jelas-jelas sudah ada kerja sama yang

disepakati dua pihak.

Apalagi, dalam perencanaan sistem parkir akan diubah menjadi elektronik. Jika polemik belum diselesaikan, maka rencana tersebut akan sulit terealisasi. Padahal menurut dia, ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari sistem elektronik tersebut.

Baik untuk pengguna jasa parkir maupun untuk Pemkab sendiri. Sebab dengan sistem tersebut bisa meminimalisir kebocoran pendapatan. (nis/vga)



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Komisi D Minta Tingkatkan Kualitas Pendidikan dengan Akreditasi

KOTA-Komisi D DPRD Sidoarjo menilai mutu dan kualitas pendidikan di setiap lembaga pendidikan harus diperhatikan. Terutama sekolah swasta yang harus rutin memperbarui akreditasi sekolahnya. Hal itu dilakukan agar seluruh masyarakat Sidoarjo bisa mendapatkan pendidikan yang baik secara merata.

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso menyebutkan, lembaga pendidikan swasta wajib memperbarui status akreditasinya setiap 5 tahun sekali. Jangan sampai ketika sudah mendapatkan akreditasi A, ternyata itu sudah 8 tahun yang lalu. Sehingga kondisi di lapangan sudah berbeda. Baik dari segi sarana prasarannya, maupun SDM pendidiknya.

Dari data kemendikbud, jumlah sekolah swasta di Sidoarjo cukup mendominasi. Misalnya di tingkat SD, jumlah seko-

lah negeri ada 466 sementara sekolah SD swasta ada 359. Kemudian tingkat SMP, jumlah sekolah negeri ada 50 sedangkan SMP swasta ada 201.

Pihaknya tidak ingin ada sekolah yang nilai akreditasinya tidak sesuai dengan kondisi terbaru. Menurut dia, nilai akreditasi tidak hanya dipergunakan untuk menaikkan image sekolah. Tapi sebagai data untuk memperoleh gambaran kinerja sekolah, keterkaitan dengan mutu dan kualitas pendidikan.

Basis data yang digunakan dalam penilaian akreditasi salah satunya adalah dapodik. Namun banyak kejadian pada saat pengisian dapodik sekolah, data yang diberikan berbeda dengan kondisi riil di sekolah. Data yang diberikan data yang bagus-bagus, demi mempengaruhi nilai akreditasi sekolah. (nis/vga)

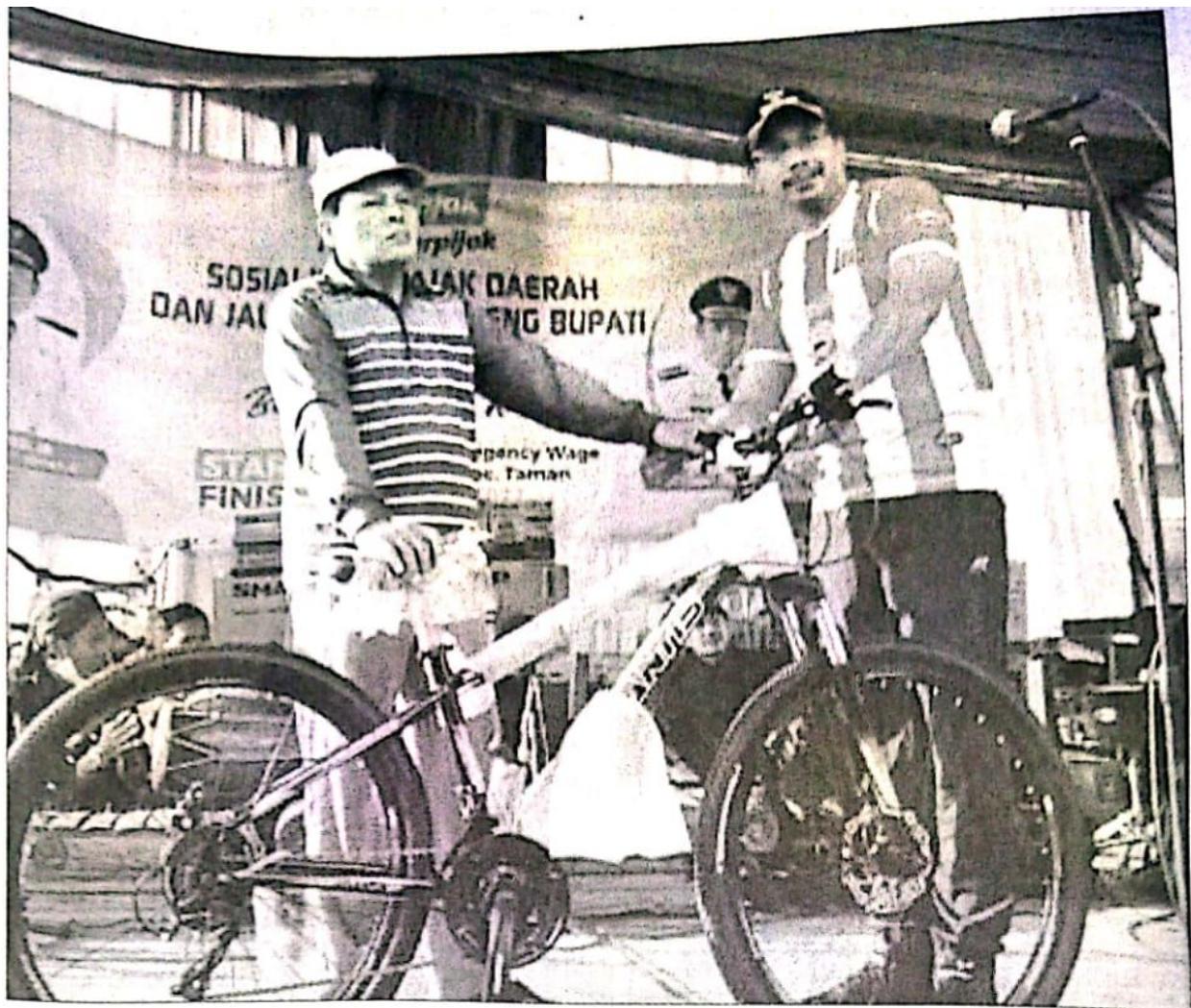
CS Dipindai dengan CamScanner

 **RADAR**  
SIDOARJO.ID



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



BMIST

**BERI REWARD:** Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali memberi reward sepeda gunung kepada Wujud, warga Desa Wage, Kecamatan Taman setelah menjadi orang pertama di desanya yang lebih dulu membayar pajak PBB.

## Jadi Orang Pertama Bayar PBB, Gus Mudhlor Hadiah Sepeda Gunung

**SIDOARJO (BM)** - Warga Desa Wage, Kecamatan Taman, Muhammad Wujud mendapat reward Sepeda Gunung dari Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, setelah menjadi orang pertama di Desa Wage yang lebih dulu membayar pajak PBB.

Bukan hanya patuh, tapi yang dulakukan Wujud adalah bentuk kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya. Penyerahan reward tersebut bersamaan dengan kegiatan sosialisasi pajak daerah yang dilakukan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo sekaligus jalan sehat bareng Bupati Sidoarjo, Minggu, (11/12) di Balai Desa Wage.

Bupati Sidoarjo mengapresiasi warga Wage tersebut, menurutnya apa yang dilakukan Wujud merupakan teladan yang patut ditiru. Dirinya juga menyampaikan, bahwa penerimaan pajak penggunaannya yakni untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada warga yang patuh membayar pajak. Pak Wujud ini meru-

pakan warga negara yang baik, sedari awal di bulan Januari sudah membayar pajak," jelasnya.

Sebenarnya di Desa Wage ini, lanjut Muhdlor, belum seluruh warganya patuh membayar pajak. Desa semacam ini yang harus didatangi agar termotivasi warganya untuk membayar pajak.

"Melalui momentum jalan sehat ini, saya harapkan warga Desa Wage tetap guyub, rukun, sehat, dan kompak selalu. Ini aset yang harus kita jaga, aset itu tidak harus berupa barang," jelasnya.

Ketaatan dalam membayar pajak ini juga menjadi salah satu aset pembangunan. Mengingat, pembangunan akan berjalan dengan lancar jika, warganya patuh dan taat membayar pajak untuk pembangunan sarana dan prasarana negara.

"Semoga momen ini bisa memotivasi kesadaran wajib pajak untuk terus bersemangat dalam menaati dan mematuhi pembayaran pajak baik individu maupun lembaga, demi pembangunan Kabupaten Sidoarjo," harap Gus Mudhlor. (udi)

## Dinkes: Banyak Warga Masih Melakukan BABS

**SIDOARJO (BM)** - Ribuan warga Sidoarjo tercatat masih kerap kali melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Hal ini terungkap dalam data akses jamban setiap kecamatan milik Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo.

Pada bulan November kemarin, Dinkes Sidoarjo mencatat sedikitnya ada 7.015 orang yang saat ini terverifikasi masih melakukan perilaku BABS tersebut. Hal ini tentu menjadi catatan tersendiri bahwa warga Sidoarjo masih belum maksimal menjalankan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

"Wilayah Kecamatan Krian menjadi

paling banyak dengan total 1.345 orang di Krian masih melakukan BABS. Itu terverifikasi oleh kami bersama Puskesmas Krian dan Barengkrajan," kata Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Sidoarjo, Sri Andari.

Andari menambahkan, dari total 33.254 rumah, 31.945 rumah sebenarnya sudah memiliki jamban yang ideal di Krian. Permasalahannya, Andari mengatakan, masih banyak dari warga di sana yang memanfaatkan banyaknya sungai untuk tempat BAB. "Kalau pun tidak (di sungai), rumah-rumah warga yang punya jamban ini tidak punya septic tank," ucapnya.

Kendati demikian, Andari mengungkapkan, sejauh ini tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat sudah mulai menunjukkan peningkatan. Dia menyebut hingga bulan November kemarin ada kenaikan hingga 60 persen angka Open Defecation Free (ODF) atau perilaku tidak buang air besar sembarangan di Sidoarjo.

Dia mengharapkan, angka ini bisa terus ditingkatkan berseiring dengan kesadaran yang meningkat. Sehingga ke depannya, wilayah Kabupaten Sidoarjo bisa terbebas dari permasalahan BABS tersebut. **(udi)**



Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Sidoarjo, Sri Andari

BM1ST



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## LINTAS PELAYANAN

# Banyak Masyarakat Ajukan Izin Rayakan Malam Tahun Baru 2023

### Sidoarjo, Bhirawa

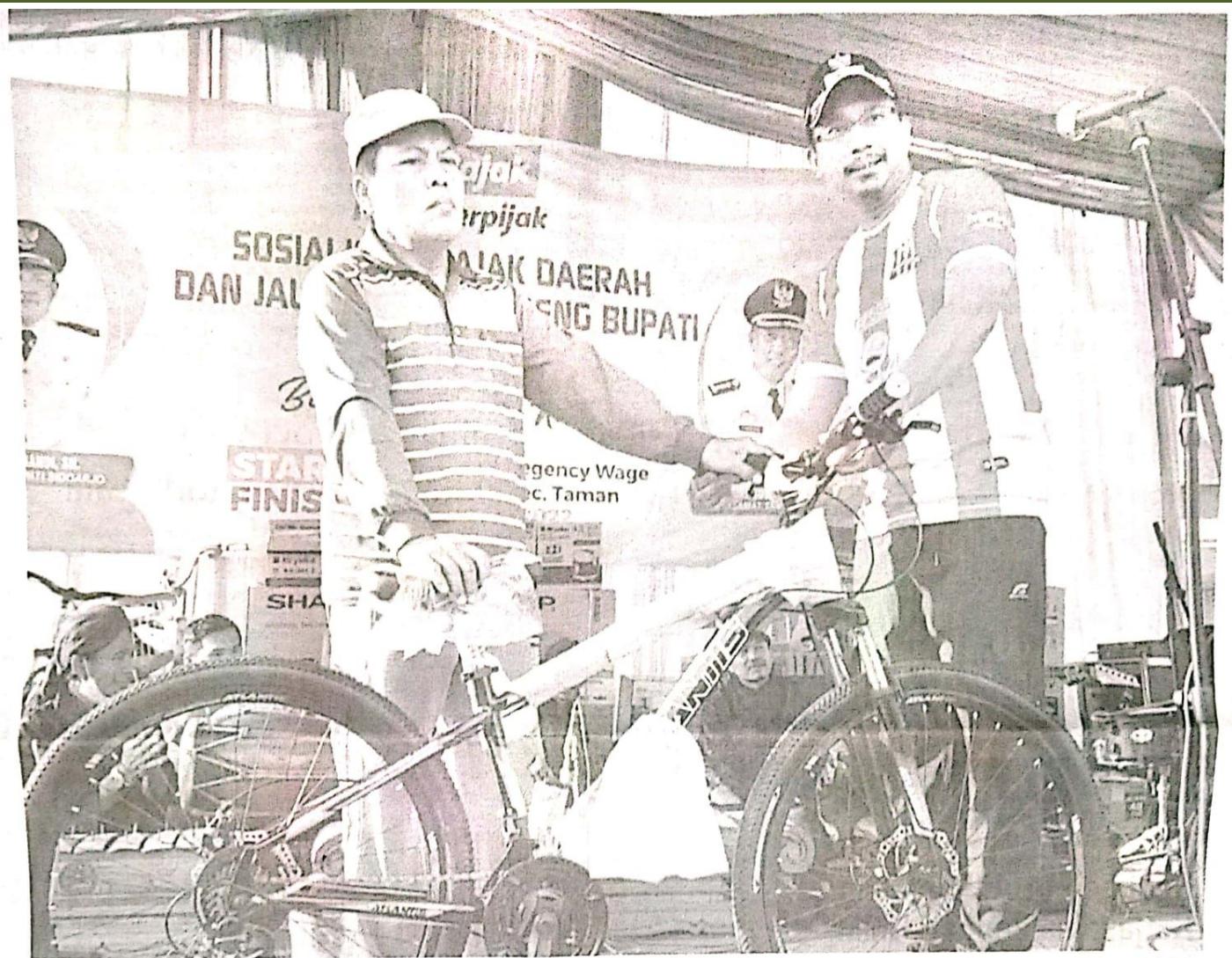
Perayaan malam pergantian tahun baru 2023 di Kota Sidoarjo, masyarakat diprediksi akan melakukan dengan los, sebab masyarakat menganggap pandemi covid-19 telah menurun. Menurut Kabag Ops, Polresta Sidoarjo, Iptu Gde Budayasa, setahu dirinya saat ini sudah mulai banyak kalangan masyarakat yang mengajukan izin untuk digelar saat pergantian tahun baru 2023.

“Bebas boleh, saat perayaan tahun baru 2023, tapi harus tetap waspada, waspada keamanan maupun waspada pada kesehatan, sebab pandemi covid-19 masih belum 100% hilang,” kata Iptu Gde, Selasa (13/12) kemarin, di ruang rapat delta karya Setda Sidoarjo, saat mengikuti rapat koordinasi dengan Pemkab Sidoarjo, untuk persiapan Natal 2025 dan tahun baru 2023, bersama Muspika dan OPD terkait di Pemkab Sidoarjo.

Diakuinya Kota Sidoarjo yang selama ini sebagai kota penyangga Kota Metropolitan Surabaya, selalu ramai dengan aktivitas masyarakat. Apalagi nanti saat perayaan malam tahun baru 2023, dinyakini akan semakin ramai.

Mengantisipasi kemacetan lalu lintas, kejahatan dan kecelakaan saat perayaan malam tahun baru 2023, pihak Polresta Sidoarjo akan mendirikan pos-pos keamanan pada sejumlah titik dan melakukan operasi gabungan. Di antaranya di Trosobo Krian, Waru, jalan Monggosidi Sidoarjo, arteri Porong dan pasar Krian.[kus.ca]

HARIAN  
**Bhirawa**  
Maka Dapat Kita Saksikan



ahmad suprayogi/bhirawa

Bupati Sidoarjo sedang menyerahkan hadiah berupa sepeda.

## Bupati Beri Hadiah Sepeda pada Pembayar PBB Pertama

Sidoarjo, Bhirawa

Warga Desa Wage Kecamatan Taman, Muhammad Wujud mendapat reward Sepeda Gunung dari Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali. Wujud mendapat hadiah sepeda karena menjadi orang pertama di Desa Wage yang lebih dulu membayar pajak PBB.

Bukan hanya patuh, tapi yang dilakukan Wujud adalah bentuk kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak-

ya. Uang pajak yang diterima tersebut dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur.

Penyerahan reward tersebut bersamaan dengan kegiatan sosialisasi pajak daerah yang dilakukan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo sekaligus jalan sehat bareng Bupati Sidoarjo, di Balai Desa Wage, kemarin.

Bupati Muhdlor mengapresiasi warga Wage tersebut, menurutnya

apa yang dilakukan Wujud merupakan teladan yang patut ditiru. Bupati alumni SMAN 4 Sidoarjo itu juga menyampaikan, bahwa penerimaan pajak penggunaannya yakni untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Sidoarjo. "Saya mengucapkan terima kasih kepada warga yang patuh membayar pajak. Pak Wujud ini merupakan warga negara yang baik, sedari awal di bulan Januari sudah membayar pa-

jak," jelasnya.

Sebenarnya di Desa Wage ini, belum seluruharganya patuh membayar pajak. Desa semacam ini yang harus kita datangi untuk memotivasi warganya sadar membayar pajak. "Melalui momentum jalan sehat sekaligus ini saya harapkan warga Desa Wage tetap guyub, rukun, sehat, dan kompak selalu. Ini aset yang harus kita jaga, aset itu tidak harts berupa barang," jelasnya. [ach.ca]

HARIAN  
**Bhirawa**

# Ajak OKP dan Perguruan Silat

## ► Cegah Gangguan Keamanan

**SIDOARJO, SURYA** - Keamanan dan kondusifitas daerah merupakan tugas bersama untuk menjaganya. Termasuk terorisme, radikalisme dan berbagai bahaya laten lain harus menjadi perhatian bersama agar Sidoarjo tetap aman dan kondusif. Demikian disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sidoarjo, Ainur Rahman di hadapan puluhan perwakilan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) serta sejumlah perwakilan

dari perguruan silat di Sidoarjo, Selasa (13/12).

Dalam acara temu kewaspadaan deteksi dini cegah gangguan kamtibmas di Sidoarjo yang digelar di Hotel Luminor itu, Ainur mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga Sidoarjo. Khususnya kepada OKP dan perguruan silat yang ada.

"Terorisme dan radikalisme merupakan bahaya laten yang harus terus menerus mendapatkan perhatian. Meski Sidoarjo tidak memi-

li budaya radikalisme atau sebagainya itu, namun potensi ancaman itu ada," kata Ainur.

Karena itu, semua pihak harus ikut bersama-sama menjaga. Karena persoalan ini bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tapi tanggung jawab bersama.

"Budaya kita sebagai kota yang agamis, budaya kita sebagai kota yang penuh toleran, sangat tidak mengenal radikalisme maupun teroris-

me, akan tetapi ancaman itu selalu ada. Sehingga kita harus terus waspada dan melakukan berbagai pencegahan," lanjutnya.

Kewaspadaan dini terhadap bahaya laten radikalisme maupun terorisme perlu ditingkatkan. Melalui forum kegiatan seperti ini diharapkan deteksi dini cegah radikalisme terorisme dan gangguan Kamtibmas di Kabupaten Sidoarjo dapat dilakukan.

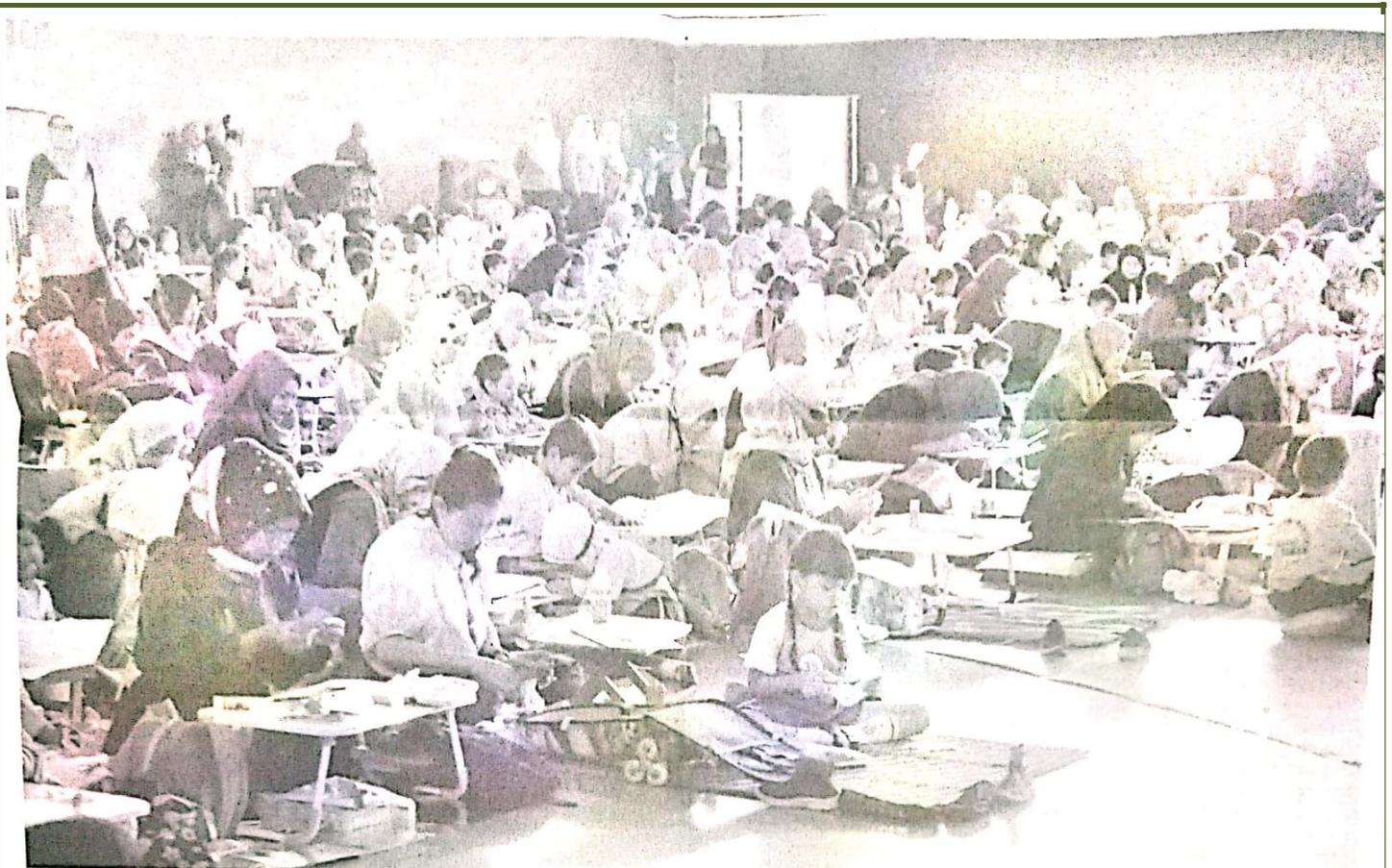
"Forum ini akan meningkatkan kewaspadaan kita untuk mencegah hal-hal yang mengarah pada radikalisme dan terorisme," ujarnya.

Di kesempatan itu, Ainur Rahman juga menyinggung keberagaman organisasi yang ada di Sidoarjo. Keberagaman tersebut tidak lantas membuat perbedaan yang menjadikan perpecahan, namun perbedaan tersebut dapat menjadi modal memperkuat persatuan.

"Perbedaan-perbedaan itulah yang menjadikan Indonesia, termasuk Sidoarjo, menjadi besar. Meski berbeda namun sejatinya semuanya satu. Kita adalah bangsa yang besar, kita adalah Indonesia, kita adalah Sidoarjo, kita berdamai di Sidoarjo, kita mencari makna di Sidoarjo," kata dia. (ufi)



TEMU KEWASPADAAN-Acara temu kewaspadaan deteksi dini cegah radikalisme, terorisme, dan gangguan kamtibmas yang digelar di Sidoarjo.



Para peserta sangat antusias mengikuti literasi di GOR Sidoarjo.

ahmad suprayogibhrawa

## IGTKI-PGRI Gelar Festival Literasi Anak-anak PAUD

Sidoarjo, Bhirawa  
Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia PGRI (IGTKI - PGRI) Kabupaten Sidoarjo menggelar puncak acara Festival Literasi untuk anak-anak PAUD, yang diikuti sekitar 6000 peserta berasal dari lembaga TK - PAUD di seluruh Sidoarjo. Nampak, hadir Bunda PAUD Sidoarjo Ny Sa'adah Ahmad Muhdlor, pada Selasa (13/12) di Gedung Serbaguna GOR Sidoarjo.

Festival tersebut fokus pada pembelajaran 3M, yakni Me-

lipat, Menggantung, dan Menempel. Pada babak grand final festival tersebut menyisihkan 260 peserta.

Menurut, Sa'adah Ahmad Muhdlor mengatakan melalui literasi, orang tua dapat menyisipkan banyak pesan, terlebih pesan moral. Dikatakannya usia golden age adalah usia yang tepat untuk membentuk karakter dan akhlak seorang anak. Salah satunya dengan membiasakan membacakan cerita kepada anak.

"Usia golden age adalah usia

yang tepat untuk kita membentuk karakter dan akhlak melalui literasi yang menarik, mari kita biasakan membacakan cerita kepada anak," ucap Ning Sasha\_sapaan akrabnya.

Ning Sasha itu mengatakan di usia emas, literasi dini penting diberikan orang tua kepada buah hatinya. Tujuannya bukan untuk menuntun mereka bisa membaca. Namun lebih kepada bagaimana anak-anak bisa mengerti cerita yang disampaikan. Oleh karenanya literasi yang disampaikan

hendaknya yang memiliki pesan moral.

"Jadi bukan menuntun mereka untuk bisa membaca, namun lebih kepada bagaimana anak-anak bisa mengerti cerita yang disampaikan, sehingga kita dapat menanamkan akhlak yg baik di usia dini melalui literasi. Itu yang harus lebih ditekankan," pungkasnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Dr Tirta Adi MPd pembelajaran melipat, menggantung, dan

menempel menjadi fokus kegiatan festival kali ini. Metode dasar tersebut dinilai tepat digunakan untuk mengembangkan gerak motorik halus anak-anak. Sebab dalam teknik ini dapat melatih ketelitian dan keuletan. Selain itu dalam kegiatan tersebut juga diisi dengan kegiatan literasi. Menurutnya literasi dini penting disampaikan orang tua kepada putra putrinya. Bahkan ia meminta orang tua dapat menciptakan lingkungan literasi di rumah. [ach.why]

HARIAN  
**Bhirawa**

## Bupati Minta TNI, Polri dan ASN Jaga Netralitas di Pemilu 2024



AMAN: Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor saat menandatangani pakta Integritas untuk Pemilu 2024.

KOTA-Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk pemilu 2024 telah dibentuk. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengharapkan pemilu dapat berjalan lebih netral dan tetap menjaga keindahan kota.

Netralitas itu berkaitan dari peran Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun TNI dan Polri yang ada di Sidoarjo. Dalam waktu dekat, Pemkab juga akan menerbitkan edaran terkait netralitas ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

Muhdlor mengungkapkan, 2024 nanti banyak pemilu yang berlangsung. Mulai dari pemilihan presiden, pemilihan legislatif hingga pemilihan kepala daerah. "Kami yakin baliho maupun flyer akan banyak bertebaran,"

katanya. Tidak sedikit ruang terbuka hijau, simpang empat, hingga pohon-pohon di Sidoarjo bakal jadi sasaran untuk memasang alat peraga kampanye. Hal itu patut ditertibkan sebagaimana ketentuan yang ada.

Alumnus Universitas Airlangga Surabaya itu berharap, pemilu dapat berjalan semarak tapi tetap tidak mengesampingkan faktor lingkungan. Nantinya organisasi perangkat daerah (OPD) terkait seperti Satpol PP juga akan terlibat dalam penertiban. "Tetap semarak tapi tidak mengesampingkan keindahan kota," terangnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Si-

doarjo Haidar Munjid mengungkapkan, dalam pemilu 2019 lalu pihaknya mencatat ada 706 pelanggaran yang terjadi. "Bawaslu cukup berpengalaman, dan tidak akan pandang bulu untuk memproses pelanggaran yang ada," tuturnya.

Kordiv Penindakan Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Sidoarjo Agung Nugraha menambahkan, tercatat ada 692 pelanggaran yang terjadi berkaitan pelanggaran administratif, tata kelola dan alat peraga kampanye. Artinya persoalan alat peraga kampanye itu juga patut jadi perhatian.

"Kami harap semua elemen masyarakat bergotong royong untuk mengawasi pemilu," imbuhnya. (son/vga)



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



(FT/LOETFI)

Petugas PJU Dishub Sidoarjo memperbaiki PJU padam, usai aporan warga usai terima pengaduan (laporan) Senin (12/12/22) malam

## PJU Padam Sejam Berfungsi

**SIDOARJO** - Selain laporan warga atas kerusakan PJU di Call Center 112 bebas pulsa, masih ditemukan kerusakan PJU (Penerangan Jalan Umum) yang padam di Sidoarjo. Salah satunya yang dilaporkan warga padamnya PJU sepanjang jalan Perumtas 3 Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Senin (12/12/22) malam.

Petugas tidak sampai satu jam sudah tiba dilokasi langsung perbaikan walau dalam suasana gerimis.

Pantauan duta kerusakan juga ada dari temuan tim "Palang Serang" yang berpatroli. Dan petugas juga melakukan perbaikan langsung karena dalam satu wilayah Desa seperti di desa Popoh.

Terkait padamnya PJU di sepanjang jalan Perumtas 3 Desa Popoh Samsul pemilik warkop Sedulur mengatakan kurang tahu pastinya bisa 4-5 hari dan sepertinya belum ada yang melapor. Tadi malam itu langsung datang petugas PJU dan memperbaiki.

Petugas berharap kalau warga mengetahui ada PJU padam, ya segera laporan ke dinas terkait, agar bisa segera dibenahi langsung, karena rkasihan pengguna jalan warga sekitar karena jalan terlihat petang sekali.

"Saya melaporkan atas padamnya PJU dan ternyata respon cepat petugas sekitar 6-7 orang dengan enghu akan mobil operasional datang untuk memperbaiki, hal ini setelah kurang lebih 15 menit setelah laporan saya tadi malam mas," ungkap Samsul Selasa (13/12/22) pagi.

"Proses perbaikan tidak sampai satu jam lampu PJU sudah kembali menyala, dan terimah kasih buat petugas PJU atas ditindak lanjuti soal laporan PJU yang padam. Salut buat petugas PJU, laporan belum sampek 1 jam sudah datang dilokasi langsung walau Susana gerimis dan langsung nyala. Sekali lagi terima kasih banyak untuk petugas PJU," pungkask Samsul.

Dikonfirmasi di lokasi Senin (12/12/22) malam sekitar pukul 23.00 wib, Jirin mandor ketua regu "Palang Serang" (Pantang pulang sebelum terang) usai perbaikan mengatakan, begitu mendapat telepon dari pak Ari (Kabid PJU) kami meluncur ke lokasi Desa Popoh. • loe

CS

**DUTA**

## Targetkan 17 Jalan Dibeton, 14 Tuntas, 3 Masih Dikerjakan

**SIDOARJO** - Awal tahun ini, pemkab mencanangkan betonisasi di 17 jalan. Hingga dua pekan menjelang akhir tahun, 14 ruas jalan sudah tuntas dibeton. Sementara itu, tiga sisanya masih dikerjakan.

Plt Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Sidoarjo Rizal Asnan menyebutkan, sejumlah ruas yang sudah tuntas, antara lain, ruas Jalan Betro-Kalanganyar, ruas Jalan Panjunan-Suko, ruas Jalan Pilang-Tulangan, ruas Jalan Ngingas-Pabean, dan ruas Jalan Krian-Kemangsen. "Yang belum, kami percepat," katanya.

Pihaknya optimistis pengerjaan bakal selesai tepat waktu. Sebab, hanya ada beberapa titik yang belum selesai dibeton. Selain itu, ada yang hanya menunggu pengeringan beton. Yang belum selesai, antara lain, ruas Kebonagung-Kemasan. Jalan yang melintasi Kecamatan Wonoayu itu kini baru bisa dilewati setengah jalan. Sebab, di beberapa titik masih menyisakan setengah jalan



DIMAS MAULANA/JAWA POS

**SEBENTAR LAGI SELESAL:** Pengguna jalan melintas di Jalan Raya Becirongengor yang masih dalam proses betonisasi kemarin (13/12). Betonisasi ruas Kebonagung-Kemasan masih kurang setengah.

yang belum dilapisi beton. Dengan demikian, kendaraan roda empat masih dialihkan melewati Jalan Raya Pilang Wonoayu. Namun, pengendara motor masih bisa melintas.

Selain menuntaskan betonisasi, pihaknya tengah menggenjot perbaikan lewat satgas jalan. Hampir setiap hari satgas jalan keliling. Di antaranya, perbaikan

dengan pelapisan aspal di jalan berlubang di Desa Kedung Boto, perbaikan di Jalan Jedong Cangkring Wonoayu, dan penuntasan perbaikan di Jalan Singogalih, Kecamatan Tarik. "Warga juga masih bisa mengadu kepada kami jika menemukan titik yang rusak. Kami terjunkan tim untuk perbaikan," pungkasnya. (uzi/c12/any)

## Jawa Pos

### Pengelola Parkir PT ISS

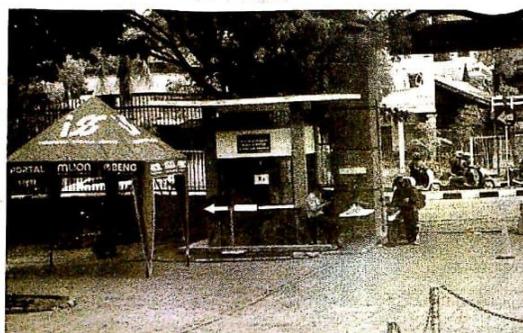
## Gagal Target Rp 20,4 Miliar, Realisasi Rp 300 Juta

**SIDOARJO** - Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo Bambang Pujiyanto, mengatakan bahwa hingga saat ini anggaran yang masuk hanya Rp 300 juta dari target sebesar Rp 20,4 Miliar melalui sektor retribusi parkir.

"Itupun masih dikurangi honor pembayaran Jukir (Juru Parkir, red) sebesar Rp 1,5 Miliar dan biaya cetak karcis parkir, katanya Selasa 13/12

Dikatakan oleh politisi Partai Gerindra itu bahwa hingga saat ini pihaknya belum mengetahui nilai pendapatan dari hasil kerjasama pengelolaan parkir tepi jalan dan tempat khusus yang dikelola oleh PT Indonesia Sarana Service (ISS).

"Berdasarkan informasi yang kami terima, sama sekali belum ada pembayaran imbal jasa



**PARKIR:** Tempat khusus parkir yang dikelola oleh PT Indonesia Sarana Service (ISS) di Kabupaten Sidoarjo

kerjasama dari PT ISS sampai saat ini. Sepertinya polemiknya juga belum selesai, termasuk

rencana adendum PKS (Perjanjian Kerjasama, red)," ucapnya. Untuk itu, pihaknya akan

mempertanyakan kepada Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani masalah ini sehingga gagal memenuhi target pendapatan sebesar Rp 20,4 Miliar.

"Ya harus dipertanggungjawabkan, kenapa sampai gagal memenuhi target pendapatan sebesar Rp 20,4 Miliar itu," tandasnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bisa dipastikan gagal dalam memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir di tahun anggaran 2022 ini. Karena hingga pekan kedua di bulan Desember 2022 ini, belum diketahui dengan pasti jumlah rupiah yang terserut ke Kas Daerah (Kasda) Kabupaten Sidoarjo.

Padahal di awal tahun 2022 lalu sempat berhembus angin surga dari hasil lelang kerjasama pengelolaan parkir tersebut yang menelurkan angka Rp 32,09 Miliar bersih tanpa potongan ke Kasda Kabupaten Sidoarjo.

Sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam lelang, uang itupun seharusnya dibayarkan di depan atau sebelum pihak rekanan Pemkab Sidoarjo beraksi di lapangan. Namun dalam PKS yang ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sidoarjo dan Direktur PT ISS, klausul tersebut diubah menjadi pembayaran secara bertahap setiap tanggal 18/bulannya.

"Tahun 2021 lalu juga gagal. Nanti akan kita panggil OPD terkait untuk menjelaskan masalah ini," tegasnya. • (yud)

## Awas, Tilang Manual Bakal Diterapkan Lagi di Sidoarjo

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Tilang manual akan diterapkan kembali di Sidoarjo. Pihak kepolisian menyebut tilang manual akan menyasar para pelaku balap liar dan knalpot brong.

KBO Lantas Polresta Sidoarjo Iptu Heri Nugroho saat dikonfirmasi menjelaskan jika tilang manual akan diberlakukan guna menciptakan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas) di Kota Delta.

Tak hanya itu saja, Heri juga mengatakan jika ke depan para pengendara yang kedapatan telah melanggar akan dilakukan penindakan secara tegas. "Kami ingin mewujudkan kondisi kamseltibcar di Sidoarjo sepanjang waktu. Terlebih saat ini momennya jelang Nataru," kata Heri saat dikonfirmasi, Selasa (13/12).

Heri juga memaparkan bahwa faktor keterbatasan kemampuan kamera pengawas tilang elektronik atau ETLE juga menjadi faktor penting.

Banyaknya pengendara yang memalsukan plat nomor, memodifikasi hingga menyamarkan plat nomor agar tidak terlihat, menurutnya, juga menjadi hal yang masih sulit dideteksi kamera elektronik. "Nah, ini juga yang kami maksud ETLE hanya bisa menangkap dan mengidentifikasi pelanggar berdasarkan nopol," ucapnya.

Oleh karena itu, tilang manual menjadi salah satu cara petugas untuk mencari solusi atas kendala yang ada saat ini. Heri berharap dengan adanya upaya tersebut, angka pelanggaran di Sidoarjo menurutnya bisa ditekan, dan angka kecelakaan di Kota Delta bisa menurun. (cat/rd)



Tilang manual akan diberlakukan lagi kepada pelanggar lalu lintas.

## Akademisi: Fenomena Gangster di Sidoarjo adalah Perilaku Imitasi

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Menanggapi tren fenomena gangster yang sedang marak terjadi di Sidoarjo, akademisi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) menyebut bahwa hal tersebut adalah perilaku imitasi (peniruan).

Dosen sekaligus praktisi ilmu sosial Umsida, Didik Hariyanto memaparkan bahwa fenomena gerombolan gangster yang sedang marak saat ini adalah hasil peniruan perilaku dari yang sudah ada di daerah lain.

"Dalam ilmu sosial ada yang namanya teori imitasi atau peniruan. Nah teori ini mengatakan, jika ada sesuatu tindakan yang dilakukan individu atau kelompok terjadi secara terus-menerus maka dapat menimbulkan inspirasi bagi sebagian kelompok lain untuk melakukan sesuatu yang sama," papar dosen Ilmu Komunikasi, Selasa (13/12)

Seperti diketahui, gangster ini awalnya juga bukan dari



Praktisi ilmu sosial Umsida Didik Hariyanto.

Sidoarjo. Tapi di daerah kota-kota besar lainnya, seperti Jakarta dan Bandung. Menurutnya, pemicu dari fenomena gangster adalah peniruan tersebut. Dari dasar itulah selanjutnya mereka mempunyai eksistensi lebih yang ingin ditampilkan.

"Kenapa kemudian mereka tidak mengambil barang berharga dari korban seperti semisal begal dan rampok? Jawabannya adalah

karena kepuasannya hanya di situ (melukai korban). Apabila korban melawan, maka mereka tidak segan untuk mengajak adu jotos atau kekuatan," terangnya.

Menurutnya, gerombolan pemuda atau remaja yang telah tergabung menjadi gangster ini apabila melakukan bentuk pelanggaran hukum, mereka akan merasa kuat karena mereka melakukannya secara bersama-sama.

Didik juga mengatakan bahwa dirinya khawatir apabila ada orang-orang yang kemudian menumpangi fenomena gangster ini. Yang semula tidak berniat merampas harta benda korban, menjadi ikut melakukan hal itu. Sementara masyarakat masih belum bisa melihat antara begal atau rampok dan segerombolan anak muda yang butuh eksistensi.

Ia juga menyarankan beberapa hal yang harusnya dilakukan oleh pemerintah, pihak keamanan, dan masyarakat. Yang pertama ada tahapan preventif (pencegahan).

"Nah, kenapa harus dicegah? Karena agar tidak menjadikan yang lain terdampak atau ikut-ikutan. Semua saya rasa harus bergerak untuk mengidentifikasi hal ini baik dari keluarga maupun lingkungan sekolah. Tujuannya agar tidak terjadi imitasi atau peniruan," ujarnya.

Yang kedua, kata Didik, apabila para remaja atau pemuda

ini sudah terlanjur masuk dalam lingkungan tersebut, maka agar segera diberi wadah yang baik untuk menyalurkan eksistensinya tersebut. Ia mencontohkan, jika pemuda sering balap liar, maka pemerintah dapat mengedukasi atau membuat semacam jalur untuk balapan secara resmi.

Selanjutnya adalah penegakan fungsi hukum. Hal ini menurutnya juga harus ditegakkan. Karena jika tidak ditegakkan dan mereka diberi ruang maka mereka semakin mengakar.

"Untuk Sidoarjo masih banyak waktu untuk berbenah. Mereka bisa kita beri ruang untuk itu. Kalau menurut saya, ketika mereka sudah sampai pada tahap berbuat kriminal seperti merampok atau bahkan membunuh korban, itu harusnya pidana. Tetapi kalau masih dalam tahap mereka menakut-nakuti masyarakat, hura-hura dan sebagainya, masih bisa dilakukan sanksi pembinaan," pungkasnya. (cat/trd)

HARIAN  
BANGSA

Koran Warga Jatim



## Ubah Skema Biaya Haji, Usulkan Penghapusan Subsidi

JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diminta segera mengubah skema pembiayaan haji. Dengan begitu, tidak mengorbankan syarat istitaah (kemampuan) finansial yang wajib dijalankan jemaah.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah Cholil Nafis menilai, dalam sistem haji saat ini ada unsur subsidi. Padahal, untuk bisa berhaji, jemaah harus mampu secara finansial. Tidak boleh disubsidi atau dibantu oleh uang dari calon jemaah lainnya. "Hilangkan subsidi sama sekali. Karena orang haji itu bagi yang mampu," tuturnya kemarin (13/12).

Dia menyebutkan, ketika ongkos haji Rp 100 juta, jemaah harus membayar sejumlah itu. Tidak boleh dibantu atau disubsidi dari hasil pengelolaan dana haji calon jemaah yang belum berangkat atau di daftar an-trean. "Biarlah jemaah membayar biaya haji sepenuhnya," katanya. Dengan demikian, aspek istitaah secara finansial tidak dilanggar.

Selain itu, Cholil Nafis menyampaikan, ketika biaya haji dinilai terlalu besar, penyelenggaraannya bisa dibuat lebih efektif. Misalnya, memangkas durasi tinggal dari sekarang sekitar 40-an hari menjadi 20 hari saja. Tinggal pengaturan penerbangannya

dibuat lebih terbuka dan efektif sehingga bisa memberangkatkan banyak rombongan setiap hari.

Sorotan terhadap pengelolaan keuangan haji oleh BPKH juga disampaikan pengamat haji Ade Marfuddin. Dia mengatakan, haji merupakan ibadah personal, bukan ibadah kelompok. Karena itu, menurut dia, skema pemberian dana hasil pengelolaan kepada jemaah haji oleh BPKH saat ini tidak tepat. "Seharusnya seperti Tabung Haji di Malaysia," katanya tadi malam.

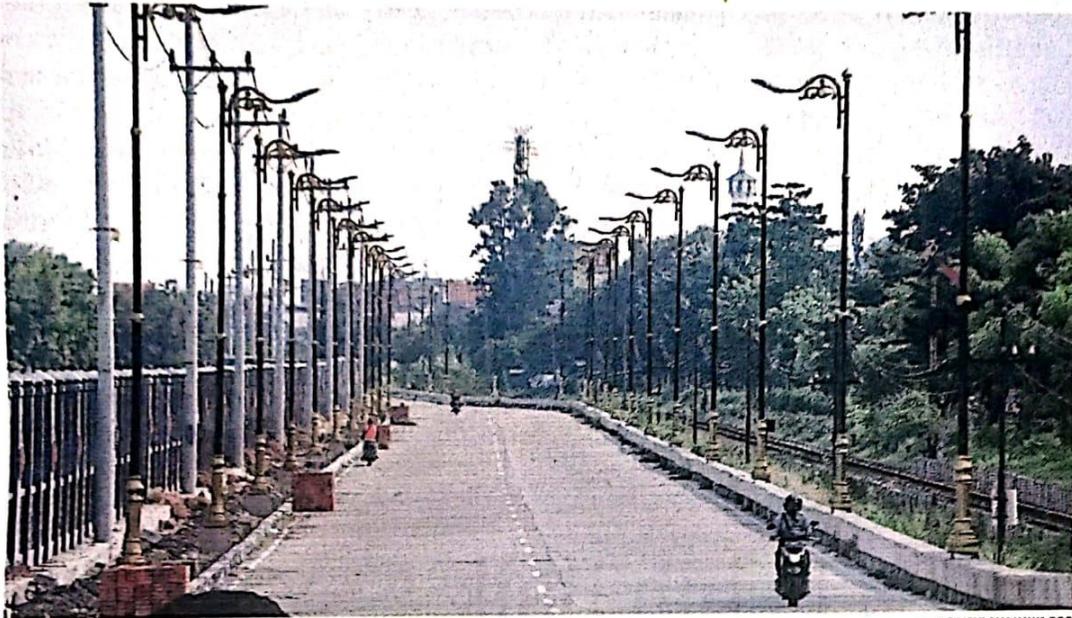
Ade mengatakan, di Tabung Haji Malaysia, uang hasil pengelolaan dana haji disalurkan secara detail untuk masing-masing calon jemaah haji. (wan/c6/fal)

# Jawa Pos



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



DIMAS MAULANA/JAWA POS

**TAMPIL BEDA:**  
Sejumlah penerangan jalan umum (PJU) terpasang di sepanjang frontage road di kawasan Gedangan, Sidoarjo, kemarin (13/12).

## Pasang 56 PJU Tematik di Jalur Frontage Road

**SIDOARJO** - Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo memasang 56 tiang penerangan jalan umum (PJU) tematik di sepanjang jalur *frontage road* (FR) Aloha-Gedangan yang sudah terbangun tahun lalu. Rencananya, pada 24 Desember mendatang, lampu tersebut sudah bisa dinyalakan.

Tiang PJU itu berbeda dengan kebanyakan tiang PJU di Sidoarjo. Tiang dan penyangga lampu terbuat dari besi berbentuk klasik. Harapannya, itu bisa menjadi ikon baru di Sidoarjo. PJU dipasang di kedua sisi jalur FR.

Kepala Bidang PJU Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo Arie Prabowo me-

nyatakan, pembangunan PJU tersebut sudah selesai. Namun, penyambungan listriknya baru dikerjakan dalam pekan ini. Targetnya, lampu tersebut bisa menyala pada 24 Desember mendatang. "Jadi kado untuk liburan Nataru sehingga ada suasana yang berbeda," jelas Arie.

Arie menyebutkan, pembangunan PJU itu hanya di segmen 1 FR yang sudah terbangun pada tahun lalu. Sebab, jalan tersebut sudah tuntas terbangun. "Karena titik tersebut juga jadi pintu pertama untuk masuk Sidoarjo," jelas Arie. Sementara itu, segmen yang dibangun tahun ini masih menunggu proses pembangunan

jalur FR selesai. Namun, rencananya dibangun Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo.

Menurut Arie, pembangunan 56 titik PJU itu berbeda dengan pengadaan 847 tiang PJU yang juga dibangun merata di Sidoarjo tahun ini. Untuk 847 titik PJU tersebut, dibangun standar seperti PJU pada umumnya di Sidoarjo. "Sebanyak 847 titik itu selesai kontrak pada 27 Desember. Namun, kami upayakan 24 Desember juga sudah menyala," jelasnya.

Saat ini belum semua PJU tuntas dibangun. Namun, sebagian besar tinggal *finishing*. (uzi/c12/any)

## Jawa Pos



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## BAWASLU

# Bentuk Gakkumdu, Tertibkan Pemilu

**SIDOARJO** – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sidoarjo kemarin resmi membentuk sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) untuk Pemilu 2024. Lewat gakkumdu, pengawasan pelanggaran pemilu diharapkan bisa lebih ketat. Pembentukan gakkumdu tersebut dihadiri Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.

Muhdlor menekankan, ASN harus netral dan berharap Pemilu 2024 kondusif. Terkait netralitas itu, pihaknya akan menerbitkan surat edaran bagi seluruh ASN di bawah naungan Pemkab Sidoarjo agar menjaga netralitas.

Selain netralitas, pihaknya meminta pelaksanaan pemilu mempertimbangkan lingkungan. Seperti tidak memasang alat peraga kampanye pada pohon dan titik lain yang merusak keindahan. "Harus bisa tertib sesuai ketentuan yang ada," katanya. Satpol PP akan turut terlibat dalam penertiban.

Ketua Bawaslu Sidoarjo Haidar Munjid menyatakan, pihaknya siap melakukan sosialisasi hingga penertiban. Karena itulah gakkumdu dibentuk.

"Pengalaman sebelumnya pada 2019, kami akan tegas memproses pelanggaran," ungkapnya. (uzi/c17/any)

## Jawa Pos



TINGGAL PASANG PATUNG: Miniatur kepulauan Indonesia di kawasan Taman Monumen Ilyushin, Aloha, Sidoarjo, Senin (12/12). Pengerjaan taman nyaris selesai.

## Tinggal Pasang Flying Fox dan Patung

**SIDOARJO** – Miniatur kepulauan Indonesia di Taman Aloha Juanda tuntas terpasang. Kini, menyisakan pemasangan patung Ir Juanda setinggi 7 meter dan penuntasan pemasangan perlengkapan *flying fox*.  
Kabid Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo Edi Sutiono mengatakan, setelah miniatur yang diletakkan di tengah kolam tersebut selesai dibangun, pekan ini pihaknya bakal menuntaskan pemasangan *flying fox* dan patung Ir Juanda. "Flying fox sudah terbangun, cuma ada beberapa bagian yang belum terpasang," katanya.

Kemarin (13/12) pihaknya masih menuntaskan pemasangan perlengkapan *flying fox* sekaligus merapikan area taman. Targetnya, minggu ini patung juga akan dipasang. Saat ini patung sudah dipesan dari Mojokerto dan masuk tahap *finishing*. Pembuatan patung itu cukup memakan waktu karena terbuat dari batu yang dipahat.  
"Untuk lainnya sudah selesai semuanya, hanya merapikan-merapikan saja," imbuhnya. Sekaligus, menanam tanaman dan bunga di area taman. Namun, penanaman tersebut tidak butuh waktu lama.

Edi optimistis taman tersebut selesai sesuai target. "Pekerjaan besar sudah tuntas semua. Akhir Desember bisa selesai," ucapnya.  
Namun, *flying fox* belum bisa langsung digunakan. Sebab, pihaknya harus memastikan keamanannya dulu sekaligus menempatkan petugas yang mengoperasikan.  
"Pengoperasian dan jam operasionalnya masih akan kami bahas lebih lanjut," ujar Edi. Apakah setiap hari atau hanya di hari libur. "Yang jelas, area ini bakal jadi ikon baru untuk mempercantik wajah Sidoarjo," pungkasnya. (uzi/c17/any)

## Jawa Pos

### Anggaran Minim, Akhiri Kerja Sama JKMM dengan RS Swasta



LAYANI JKMM: Puskesmas Buduran di Jalan Jawa, Sidoarjo, kemarin (13/12). Mulai tahun depan, Pemkab memaksimalkan RSUD dan puskesmas untuk melayani JKMM.

#### Mulai Tahun Depan, Maksimalkan RSUD dan Puskesmas

**SIDOARJO** – Berkurangnya anggaran jaminan kesehatan masyarakat miskin (JKMM) tahun depan membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo harus memutus kerja sama dengan rumah sakit dan klinik swasta. Apalagi, anggaran tahun ini tak cukup untuk membayar tagihan JKMM di tujuh rumah sakit mitra.  
Saat ditemui kemarin (13/12), Kadinkes Sidoarjo Fenny Apridawati mengatakan bahwa

anggaran JKMM 2022 minus Rp 12 miliar. Padahal, anggaran JKMM tahun ini mencapai Rp 36 miliar. Pada Oktober saja, dana JKMM tersisa Rp 7 juta. "Berarti kita harus *nombok* sisanya sekitar 12 miliar," katanya.  
Keputusan untuk mengakhiri kerja sama dengan RS swasta sebagai rujukan peserta JKMM juga disebabkan anggaran yang digedok untuk jaminan kesehatan pada 2023 hanya Rp 19 miliar. "Sehingga tidak ada pilihan selain menyudahi kerja sama dengan RS swasta. Ini jelas agak menyakitkan," tuturnya.  
Awal tahun ini, karena pro-

gram *universal health coverage* (UHC) dibekukan, Pemkab memaksimalkan layanan kesehatan lewat skema JKMM. Jika sebelumnya hanya ada tiga RS rujukan, yakni RSUD Sidoarjo, RSUD dr Soetomo Surabaya, dan RSJ Menur Surabaya, sejak Januari tahun ini ditambah empat RS swasta. Namun, kerja sama dengan RS swasta tersebut selesai akhir tahun ini.  
Menurut Fenny, mulai awal tahun depan, peserta JKMM akan dilayani faskes milik pemerintah. Baik itu puskesmas maupun RSUD di Kota Udang. Apalagi tahun ini RSUD Sidoarjo Barat juga telah ber-

operasi. "Nah, dari situ kesiapan dan kematangan fasilitas di puskesmas terus kita pantau mulai dari beberapa bulan ini," katanya.  
Hal tersebut bertujuan agar pelayanan di puskesmas tidak kalah oleh klinik atau rumah sakit swasta. "Begitu pun dengan RSUD Sidoarjo dan RSUD Sibar, kami akan upayakan bisa menjadi rujukan pasien JKMM dari puskesmas," ucapnya. Fenny yakin puskesmas di Sidoarjo cukup merata. "Kita punya 30 puskesmas dan akan ketambahan satu lagi tahun depan, yaitu Puskesmas Urangagung," ungkapnya. (eza/c6/any)

#### RS YANG MELAYANI JKMM

Tahun Ini

- RSUD Sidoarjo
- RSUD dr Soetomo Surabaya
- RSJ Menur Surabaya
- RS Mitra Keluarga Wuru
- RS Anwar Medika Sidoarjo
- RS Siti Hajjar Sidoarjo
- RS Siti Khodijah Sidoarjo

Tahun Depan

- RSUD Sidoarjo
- RSUD Sidoarjo Barat
- RSUD dr Soetomo Surabaya
- RSJ Menur Surabaya

GRAFIK: KICAT/JAWA POS

## Jawa Pos

## PJU Desain Klasik Hiasi Frontage Road Segmen Satu

GEDANGAN-Frontage Road (FR) dari Waru hingga Buduran tak hanya bakal jadi pemecah kemacetan. Tapi juga diharapkan bisa menjadi ikon baru Kota Delta. Karena itu, Pemkab juga memasang Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan desain lebih cantik.

PJU tersebut telah terpasang di FR segmen satu yang telah rampung. Tepat di depan markas Marinir Gedangan. Tiang PJU itu tidak sekedar tiang baja. Tapi Pemkab memasang PJU dengan desain lebih klasik.

Sebagian tiang dicat warna kemas. Lalu dikombinasikan besi bermotif sebagai penyangga lampu. Lebih enak dipandang dari PJU yang biasa terpasang di pinggir atau median jalan Sidoarjo.

Kepala Bidang PJU Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo Arie Prabowo mengungkapkan, untuk sementara waktu pembangunan PJU itu masih difokuskan di segmen satu. "Segmen dua masih belum selesai. Nanti rencananya dilanjutkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air," katanya, Selasa (13/12).

Arie menambahkan, sedikitnya ada 56 tiang PJU dipasang di lokasi tersebut. "Target nyala 24 Desember nanti. Bisa untuk kado



● Ke Halaman 10

BARU: Dereten PJU terpasang di frontage road segmen satu.

HENRIK MUCHUSON/RADAR SIDOARJO

CS Dipindai dengan CamScanner



### PJU Desain Klasik...

Natal dan tahun baru," tuturnya.

FR merupakan salah satu mega proyek infrastruktur yang tengah

dikebut Pemkab Sidoarjo. FR juga bakal menjadi akses utama masuk Sidoarjo. Dengan penambahan PJU yang lebih cantik itu diharapkan bisa menjadi salah satu

penyambut para pengendara yang melintas.

Tidak jauh dari lokasi PJU itu, Pemkab juga tengah merevitalisasi Taman Monumen Ilyushin. Taman

itu akan disulap lebih cantik. Pemkab juga melengkapi sejumlah fasilitas dan ikon baru. Seperti miniatur Pulau Indonesia, patung Ir H Juanda, hingga flying fox. (son/vga)

CS Dipindai dengan CamScanner



### Dari Diskusi Orang dengan Skizofrenia

# Cheers Latih 263 Kader Kesehatan Jiwa

#### Sidoarjo, Memorandum

Untuk memantapkan program *community health empowerment for early-detecting and reintegrating of schizophrenia* (Cheers), Yayasan Lentera Kesehatan Nusantara menggelar diskusi tentang ODS (orang dengan skizofrenia) di Hotel Luminor Sidoarjo, Selasa (13/12).

Program Cheers yang dimulai sejak tahun 2020 hingga Desember 2021 dan dilanjutkan pada 2022 di tiga kecamatan, yakni Krian, Wonoayu dan Tarik ini, diharapkan bisa mendapat dukungan dari masyarakat.

Stat Advokasi dan Komunikasi Yayasan Lentera Kesehatan Nusantara (YLKN), Hartono menyebutkan, pihaknya bersama sejumlah pihak melakukan pendampingan. Karena masyarakat kebanyakan masih malu memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa.

"Selama ini kebanyakan dipasung untuk menghindari kabur, atau mengganggu orang lain," kata Hartono.

Hartono menyebutkan melalui Cheers diharapkan akan mencapai tujuan utama. Hingga saat ini program Cheers telah melatih 263 kader kesehatan jiwa.

Dimana kader kesehatan jiwa memiliki peran meningkatkan kesadaran masyarakat dan keluarga ODS dengan memberikan informasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan atau keagamaan seperti; posyandu, arisan, majelis taklim.

"Selain itu deteksi dini terhadap orang-orang berisiko dengan melakukan kegiatan skrining," ujar Hartono.

Diskusi ini diikuti instansi oleh OPD di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Di antaranya Bappedada, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,



Suasana diskusi program ODS di Hotel Luminor, Sidoarjo.



FOTO: HARSONO/UMH

Dinas Tenaga Kerja, Puskesmas Kecamatan Tarik, Puskesmas Kecamatan Wonoayu, Puskesmas Kecamatan Krian dan mengundang Lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Sidoarjo antara lain PCNU, LKN PC Fatayat, Karang Taruna, Kopimile dan Komunitas Peduli ODS Rasi.

Tujuan utama diskusi ini adalah menyamakan persepsi dan visi tentang isu ODS. Serta, menyusun langkah-langkah strategis untuk proses advokasi ODS dan menyusun kerja sama OPD - CSO terkait di Kabupaten Sidoarjo.

Sebagai dasar dari diskusi ini sesuai amanat UU No 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat melaksanakan upaya kesehatan jiwa secara promotif,

preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Sebagai upaya advokasi, maka kegiatan yang digagas oleh Yayasan Lentera Kesehatan Nusantara (YLKN) melalui proyek Cheers, di Kabupaten Sidoarjo ini mengajak para CSO untuk bersama-sama memastikan bahwa tugas, tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah dilaksanakan secara berkesinambungan.

Kelanjutan program Cheers, perlu ditempuh langkah exit strategi untuk menyiapkan keberlanjutan program. Berbagai langkah advokasi akan dipersiapkan untuk tahun 2023 mendatang.

Hal ini bertujuan untuk menghasilkan kebijakan yang mendukung upaya yang membawa manfaat bagi masyarakat, dalam konteks program

kesehatan jiwa mengarah pada program penanggulangan gangguan kesehatan jiwa.

Berdasarkan kajian awal yang dilaksanakan Yayasan Lentera (2021), berbagai permasalahan yang berhasil diidentifikasi dari upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif antara lain masih minimnya upaya sosialisasi terkait ODS, masih sedikitnya para relawan yang terlibat, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan jiwa, belum seragamnya pelayanan kesehatan dengan fasilitas BPJS, masih sedikitnya anggaran untuk mendukung penanganan ODS, masih tingginya kasus ODS, dan penanganan bebas pasung yang masih perlu ditingkatkan.

Sementara itu, Elok Sifak Munadiroh, Ketua Pimpinan Cabang

(PC) Fatayat NU Kabupaten Sidoarjo menyatakan sangat mendukung kegiatan tersebut.

"Kami siap berkontribusi dalam penanganan masalah gangguan jiwa di Kabupaten Sidoarjo pada upaya promotif dengan melakukan sosialisasi dan peningkatan pengetahuan tentang skizofrenia. Kami memiliki banyak relawan di lapangan. Namun demikian, kami masih perlu bekal pengetahuan yang memadai tentang kesehatan jiwa/ skizofrenia, sebelum terjun ke lapangan," kata Elok.

Dari Dinas Kesehatan Sidoarjo Didik Sudjarwo, SKM Sub Koordinator Program P2PTM Keswa Dinas Kesehatan Sidoarjo menyampaikan penanganan ODS yang ada di Kabupaten Sidoarjo harus melibatkan semua pihak, terutama dari

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur karena anggaran di Dinas Kesehatan Sidoarjo sangat minim /kurang.

"Anggaran untuk ODS ini sangat besar perlu bantuan dari Propinsi Jawa Timur dan pihak pihak terkait agar nantinya penanganan ODS di Kabupaten Sidoarjo bisa berjalan dengan baik dan lancar" terang Didik Sudjarwo.

Didik Sudjarwo mencontohkan pengobatan untuk ODS harus minum obat tiap hari.

"Kalau tidak minum obat, apa yang selama ini kita berikan akan menjadi sia-sia," sabutnya.

Didik Sudjarwo mengharapkan keterlibatan keluarga ODS, masyarakat sekitar dan aparat pemerintah bisa menangani ODS di Sidoarjo bisa maksimal. (krl/jok/mik)

## MEMORANDUM

BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

# Targetkan PAD Tahun Depan Rp 1,935 Triliun

KOTA-Pemkab dan DPRD Sidoarjo optimistis tahun depan pendapatan akan meningkat. Hal itu terlihat dari target yang dipasang dalam pos Pendapatan Asli Daerah (PAD). Angkanya meningkat dibandingkan target tahun ini.

Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Deny Haryanto mengatakan, dalam pembahasan APBD 2023, target PAD sebesar Rp

1,935 triliun. Dibandingkan target tahun ini, angka tersebut meningkat. Target PAD tahun ini sebesar Rp 1,816 triliun. Hingga saat ini sudah tercapai 91 persen atau sebesar Rp 1,653 triliun.

Deny menyebutkan, sebenarnya dalam usulan di KUA-PPAS APBD 2023, target PAD sempat turun. Yakni menjadi Rp 1,810 triliun. Namun setelah pembahasan, disepakati

bahwa target PAD ditingkatkan. "Sebab masih banyak potensi pendapatan yang bisa digali," katanya.

Dia yakin pemkab bisa menggali potensi-potensi tersebut sehingga targetnya bisa terpenuhi. Sisa waktu yang ada hingga akhir tahun ini juga diharapkan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Menurut dia, salah satu yang hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan

PAD adalah dengan menggunakan teknologi. Perkembangan penerapan teknologi informasi dan ekonomi digital yang menunjukkan tren peningkatan dipercaya bisa meningkatkan PAD.

Dengan adanya digitalisasi, pemerintah jadi melekat digital. Hal itu bisa membawa dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, dia mengim-

bau agar sektor usaha di Kota Delta semakin ditingkatkan. Supaya PAD di masa yang akan datang juga meningkat. Salah satunya bisa dengan memanfaatkan digitalisasi.

Era transformasi digital harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. "Sebab transformasi digital dinilai memiliki peranan yang besar bagi perekonomian," pungkasnya. (nis/vga)